

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK**

Irene Dwi Enggarwati¹
Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU²
Dr. Muchammad Ali Syafa'at, SH.,Mhum³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
 Jalan Mayjen Haryono 169 Malang
 Email: iredwi2605@gmail.com

Abstract

Notaries are required to take responsibility for the acts that have been made, sometimes the notary deed containing false information, fraud and even untruth and often subject to Article 263, 264, and 266 Jo Article 55 of the Criminal Code. The duties of a notary is poured data and information provided by, according to the obligations of the notary in Law No. 2 Year 2014 concerning Notary article 16 section 1 letter (f). Notary Law does not specifically regulate the protection of the law for the notary in the process of being falsely linked, should be examined as a notary in a criminal case based on Article 66 must be approved UUJN MK. Pada currently in the process of the Honorary Council does not provide legal protection This was because in UUJN not regulate clearly related legal protection for a notary in criminal cases not only is it in UUJN also not set on the criminal liability of a notary deed that has been made on the basis of data and information that was falsified by the parties.

The objectives of this study were:

- 1. To analyze forms of criminal responsibility*
- 2. To determine the legal protection for notary*

The study was qualified as a normative law research that departs from a void norma. Hasil showed responsibility in the event of forgery made by the parties in accordance UUJN notary deed and rules Changes in UUJN is when the notary in the exercise of his proven violations the notary is responsible in accordance with the act of doing good in terms of the responsibility of Administrative Law, Civil Law

Key words: *criminal liability, legal protection, notary, crime false evidence act, authentic*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Dosen pembimbing ke I

³ Dosen pembimbing ke II

Abstrak

Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran dan sering dikenakan pasal 263, 264, dan 266 Jo Pasal 55 KUHP. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para ,sesuai dengan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 16 pasal 1 huruf (f). Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUDN harus mendapat persetujuan dari MK. Pada saat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUDN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUDN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Hasil penelitian menunjukkan ada tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUDN dan UU Perubahan atas UUDN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, notaris, tindak pidana keterangan palsu, akta otentik

Latar Belakang

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.⁴

Perlunya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, **Jati Diri Notaris Indonesia**, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 7.

tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁵

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti,⁶ “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo,⁷ “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.⁸ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “*bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis*”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan : “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan*”.

“Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering

⁵ Liliana Tedjosaputro, **Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana**, Bigrif Publishing, Jakarta 1994, hlm. 4.

⁶ R. Subekti, **Pokok-Pokok hukum Perdata**, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, hlm. 178.

⁷ Sudikno Martokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 142.

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan**, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 19.

pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris”.⁹ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Berikut ini contoh kasus yang sering terjadi di dunia notaris terkait pemalsuan akta otentik antara lain yaitu : karena kurang kehati-hatian notaris dalam membuat suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris tersebut terbawa dalam kasus pidana, misalnya ketika membuat akta perjanjian antara perseoran terbatas dengan perorangan dari pihak PT yang menghadap bukan dari orang yang berwenang untuk bertindak selaku orang yang ditunjuk oleh PT untuk melakukan perbuatan hukum karena kurang kehati-hatian atau ketelitian seorang notaris telah menuangkan identitas orang tersebut ke dalam minuta akta.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.¹⁰ Sedangkan tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum (notaris) berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata.

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa

⁹ Habib Adjie, **Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 24.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinya membawa ke ranah hukum pidana yaitu memberika keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini disebabkan adanya faktor dari diri notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan

terkait pemalsuan akta, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan, notaris langsung saja dipanggil oleh penyidik dan diperiksa. Kemudian pada saat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Notaris dapat mempertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang diperiksa dalam tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik?

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (concept approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang terdiri dari buku-buku, skripsi, dan tesis. Bahan non hukum berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Diperiksa Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

Notaris benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat

dihadapan notaris. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda. Berdasarkan pada pasal 66 UUDN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta izin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹¹

1) Kemampuan untuk bertanggung jawab;

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu :

- 1) Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;
- 2) Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
- 3) Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.

¹¹ Kanter dan Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 166.

Berkaitan dengan pemanggilan polisi, notaris tersebut tidak mau memberikan keterangan sebelum mendapat izin dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, karena melihat persoalan yang dihadapinya MPW menyarankan untuk memberi kesaksian kepada penyidik. Pertimbangannya, yang telah dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu khawatir.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi notaris ini mengambil inisiatif untuk mempertemukan dua belah pihak termasuk pembeli, untuk dicarikan solusi/ pemecahan agar kasus ini tidak sampai ke Pengadilan, akhirnya para pihak menyepakati untuk pembagian secara adil sehingga kasus ini tidak berlanjut dan selesai dengan damai dan kekeluargaan dengan disaksikan pihak kepolisian.¹²

2) Kesengajaan atau kealpaan;

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham.¹³ Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

¹² Tulus Pujiono, **Penerapan UUPA Belum Optimal**, Majalah Renvoi Nomor 7.43.IV, Edisi 3 April 2006, hlm. 35.

¹³ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 171.

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku.¹⁴

Alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat diadopsi dan diterapkan dalam kasus ini karena apa yang telah diperbuat oleh notaris karena ketidak sengajaan dan ketidaktahuan dari seorang notaris sehingga dianggap tidak adanya suatu kesalahan pada pihak notaris. Hal ini terutama berkenaan dengan ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta essensial untuk melanggar hukum tingkah laku, yang mendapat suatu penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui dan memahami peraturan yang melarang perbuatan tersebut namun terus dilakukan. Ketidaktahuan tentang peraturan hampir selalu tidak dapat dimaafkan karena dengan alasan demikian tidak pernah membenarkan pengadilan tidak adanya kesalahan.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pembedaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu :

- 1) Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

¹⁴ Sjaifurrahman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 197.

2) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;

3) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP:¹⁵

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Diperiksa Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini karena berpegang pada suatu asas

¹⁵ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 36.

hukum: tidak dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan menjadi: setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana.

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa : *“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”*.¹⁶ Definisi dari penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat

¹⁶ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor, 1993, hlm. 66.

¹⁷ Laden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 67.

dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan notaris terkait dengan wewenang notaris. disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan.

Berdasarkan pada pengertian pasal pemalsuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUN, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus :

1. Pasal 263 ayat (1) KUHP : adanya seorang Notaris membuat akta dan sudah dikeluarkan salinannya. Kemudian terjadi sengketa dan dihadapan penyidik salah satu pihak menyatakan bahwa akta tersebut dibuat oleh asisten notaris. Selanjutnya oleh asisten notaris akta tersebut dibawa keliling untuk ditandatangani oleh para pihak dan ketika asisten notaris tidak ketemu dengan salah satu pihak, maka akta tersebut ditinggal

(dititipkan) dan setelah ditandatangani baru diambil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lebih lanjut ternyata minuta dari akta tersebut tidak ada padahal salinan telah dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh notaris bersangkutan.¹⁸

2. Pasal 264 ayat (1) KUHP : penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP palsu). Padahal pada akta partij tersebut Notaris telah mencantumkan kata-kata” Penghadap saya Notaris kenal” ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan si pelaku.¹⁹
3. Pasal 266 ayat (1) KUHP : Penghadap datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris, dan ternyata keterangan penghadap yang telah dituangkan ke dalam akta ternyata palsu atau seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya, mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang di atur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut doktrin unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam

¹⁸ Waluyo dan Doddy Radjasa, **Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional**, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 42-43

¹⁹ Pleter E Latumeten, **Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal**, Majalah Renvoi, Nomor 11.23.II, 2005, hlm. 26.

hal ini dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi :²⁰

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah merupakan suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.

Unsur obyektif yang dimaksud merupakan unsur yang ada di luar diri pelaku terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia yang berupa : *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
- 3) Keadaan-keadaan, yang pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Dalam hal Notaris diduga melakukan perbuatan pidana pemalsuan

²⁰ Laden Marpaun, **Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Bandung, 2008), hlm. 15-16.

akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264 dan 266 KUHP maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 263 KUHP;
- b. Pasal 264 ayat(1) KUHP;
- c. Pasal 266 ayat (1) KUHP.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang diperiksa Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

1. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan hukum atas hak notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak notaris harus dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang menyatakan:²¹

- 1) *Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:*
 - a. *Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
 - b. *Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris*

²¹ Lihat Pasal 66 Undang-Undnag Jabatan Notaris.

yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris

Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris awalnya dilakukan oleh MPD. Kewenangan MPD tersebut adalah dalam hal memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik yang hendak memanggil Notaris guna kepentingan pemeriksaan terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris (Pasal 66 ayat (1) UUJN). Kewenangan ini merupakan kewenangan khusus (mutlak) yang hanya dimiliki oleh MPD, dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya (MPW, dan MPP).

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut, maka polisi, jaksa maupun hakim yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD, karena tanpa adanya persetujuan dari MPD, maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum, MPD wajib patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, dalam hal tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Apabila terdapat Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada MPD, dan dalam hal ini MPD berwenang terlebih dahulu mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Dalam sidang tersebut, Notaris akan diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya terkait dengan akta yang dibuatnya.

Apabila MPD menemukan bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka MPD dapat memutuskan agar Notaris tersebut untuk diperiksa oleh penyidik, kejaksaan atau di pengadilan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera menetapkan perubahan UUJN yang baru dengan salah satunya membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yaitu MKN. UUJN telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi Notaris, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*

Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Semestinya, setelah diundangkannya UUJN tersebut, maka pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan dari MKN tersebut, mengingat MKN telah dibentuk dan keberadaannya telah ditegaskan dalam UUJN. Dalam hal ini seolah-

olah keberadaan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas dari MKN tersebut belum diatur secara tegas, maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui MKN, yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan lembaga MPD, yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau kewenangan yang sama dengan MKN. Mengingat keberadaan MPD (dahulu) yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN berwenang memberikan persetujuan atau menolak persetujuan yang diajukan penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Berdasarkan kewenangan dari MPD tersebut, telah diatur pula mengenai tata cara atau prosedur penanganan yang wajib dipatuhi MPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Mengenai kedudukan dari MKN sebaiknya dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota (daerah), wilayah, dan pusat, hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk dan harus diselesaikan melalui MKN, dan selain itu agar lembaga MKN dapat dengan cepat tanggap dalam memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan dari penyidik

terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan Notaris itu sendiri untuk kepentingan proses peradilan. Hal ini dikarenakan undang-undang hanya memberikan waktu 30 hari untuk memberikan putusan tersebut. Apabila tidak ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut.

Keberadaan MKN yang dibentuk secara berjenjang tersebut memungkinkan juga dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut dilakukan karena MKN merupakan badan yang bersifat independen yang mengeluarkan keputusan sebagai hasil akhir dari pemeriksaan Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta ruang lingkup kewenangan yang jelas dari lembaga MKN, diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi Notaris, dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga MKN tersebut. Hal ini juga bertujuan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anggota, adalah model *perlindungan bersyarat*. Bidang Pengayoman PP-INI hanya akan memberikan bantuannya kepada anggota yang bermasalah, sepanjang ia memang adalah anggota aktif INI dan anggota tersebut selama dalam masa keanggotaannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap organisasi”.

“salah satu Bentuk perlindungan dari INI terhadap anggotanya yang dikenai sanksi jabatan, salah satunya adalah pendampingan

*pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas”.*²²

Syarat pemberian perlindungan anggota itu berlaku secara akumulatif, artinya syarat-syarat tersebut berlaku sekaligus dan menjadi ukuran standar kelayakan pemberian perlindungan. Dari hasil pemeriksaan dan penilaian berkas anggota, sebagai ukuran kelayakan pemberian perlindungan, selanjutnya pengurus akan memutuskan untuk menindaklanjutinya dengan tindakan pemberian perlindungan berupa bantuan hukum dan konsultasi hukum. Bantuan dan konsultasi hukum ini akan disampaikan kepada anggota yang bermasalah itu secara non formal. Pemeriksaan dan penilaian berkas dilakukan secepatnya.

D. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang diperiksa Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²³ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.²⁴

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.²⁵

Berdasarkan pada pasal 4 tentang sumapah jabatan notaris dan kewajiban notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan

²² Pendapat dari Winanto Wiryomartini S.H.,M.hum. dalam seminar Bimbingan Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada tanggal 30 pukul 11.00 WIB.

²³ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁴ Habib Adjie, **Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 83.

²⁵ Habib Adjie, 2012, **Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 97.

untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.²⁶ Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris”.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan adanya majelis kehormatan notaris, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Selain itu MKN juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. Memanggil notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta. Artinya dalam melakukan pemeriksaan khususnya perkara pidana aparat hukum harus melalui prosedur tata cara pemanggilan ketika majelis kehormatan notaris tidak menyetujui maka notaris tersebut tidak perlu hadir dalam proses penyidikan pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi setiap notaris.
- b. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Pasal 170 KUHAP;

²⁶ *Ibid.*

- 2) Pasal 19019 angka 3 KUHPer;
 - 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
 - 4) Pasal 277 HIR;
 - 5) Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
- c. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terhadap pernyataan yang dikehendaki oleh penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan Putusab tersebut penulis telah menganalisis dan menyimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut,

Perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Daerah yang sekarang menjadi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan pengawasan terhadap notaris supaya notaris tetap bekerja sebagai seorang yang memiliki profesional bentuk perlindungan hukumnya ketika notaris tersebut telah bertindak sesuai dengan UUJN dan etike profesi notaris maka notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri atau diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau yang disebut ini yaitu mendampingi selama dalam sidang Majelis Kehormatan Notaris ketika notaris tersebut bersalah maka akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada notaris tersebut.

Simpulan

- 1 Bahwa seorang notaris tidak akan bisa menerima jika di minta pertanggungjawaban pidana manakala dalam pembuatan akta, notaris

secara sengaja menuangkan ke dalam suatu akta dengan memalsukan identitas para pihak tetapi sepanjang keterangan yang disampaikan oleh para pihak mengandung unsur pemalsuan, penipuan dan ketidakbenaran maka yang menjadi tanggung jawab pidana sepenuhnya adalah para pihak karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap. Oleh karena itu demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP.

- 2 Bentuk perlindungan hukum dalam UUJN yaitu tersurat dalam pasal 66 UUJN bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan harus meminta izin dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan undang-undang ketika notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk mengizinkan diperiksa atau tidak diperiksa selama notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan Etika Profesi Notaris maka MKN tidak memberikan notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. serta bentuk perlindungan hukum dari INI melakukan pendampingan bagi notaris yang tersangkut hukum yaitu bentuk perlindungan hukumnya memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Habib Adjie, 2008, **Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Rafika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, **Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2012, **Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kanter dan Sianturi, 1982, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Laden Marpaun, 2008, **Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1994, **Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana**, Bigraf Publishing, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, **Jati Diri Notaris Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, **Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan**, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, 1993, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor.
- R. Subekti, 2007, **Pokok-Pokok hukum Perdata**, Cet-XXVIII, Intermasa, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjaifurrahman, 2011, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung.

Sudikno Martokusumo, 1998, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta.

Tulus Pujiono, **Penerapan UUPA Belum Optimal**, Majalah Renvoi Nomor 7.43.IV, Edisi 3 April 2006

Waluyo dan Doddy Radjasa, 2004, **Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional**, Raja Grafindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Majalah

Pleter E Latumeten, **Dapatkan Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal**, Majalah Renvoi, Nomor 11.23.II, 2005.

Pendapat dari Winanto Wiryomartini S.H.,M.hum. dalam seminar Bimbingan Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK**

Jurnal



Oleh:

IRENE DWI ENGGARWATI

136010200111006

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

